

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia dalam kancah kehidupan guna mencapai status kehidupan yang lebih baik. Peningkatan kualitas pendidikan sebagai tuntutan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang dapat berkompetisi di era globalisasi terus berlangsung. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat erat kaitannya dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah/madrasah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang kedudukannya memiliki peran sangat strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah. Kepala sekolah/madrasah juga berperan sebagai supervisor, memiliki tanggung jawab dalam memantau, membina dan memperbaiki kualitas proses belajar mengajar di sekolah sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola program peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Oleh karena itu Kepala sekolah hendaknya dapat melaksanakan supervisi secara efektif sebagaimana diamanahkan dalam Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah bahwa kepala sekolah memiliki tugas merencanakan program supervisi akademik dalam rangka profesionalitas guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat serta menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Pada kenyataannya saat ini, tidak semua kepala sekolah/madrasah menguasai seluruh dimensi kompetensi dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil survei tahun 2007 oleh Direktorat Tenaga Kependidikan, 70 persen dari 250 ribu kepala sekolah di Indonesia tidak kompeten. Kesimpulan ini diperoleh setelah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, melakukan uji kompetensi kepala sekolah berdasarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007. Uji kompetensi dilakukan terhadap 400 kepala sekolah dari 5 provinsi. Untuk memastikan temuan tersebut, uji kompetensi kembali dilakukan terhadap 50 kepala sekolah dari berbagai yayasan pendidikan dan hasilnya hampir sama. Hampir semua kepala sekolah lemah di bidang kompetensi manajerial dan supervisi. Padahal dua kompetensi itu merupakan kekuatan kepala sekolah untuk mengelola sekolah dengan baik. (*Tempo*, 12 Juni 2008). Dari data hasil uji kompetensi menunjukkan bahwa penguasaan kepala sekolah terhadap kompetensi kepribadian 67,3%, kompetensi manajerial 47,1%, kompetensi supervisi 40,4%, kompetensi sosial 64,2% dan kompetensi kewirausahaan 55,3% (Kemdiknas, 2011:1).

Peran kepala sekolah sebagai supervisor juga belum optimal. Dalam pelaksanaannya supervisi tersebut dilakukan seperti mengadili guru dan tanpa memberikan umpan balik yang memadai kepada guru. Dalam implementasi supervisi akademik oleh kepala sekolah masih terdapat penyimpangan-

penyimpangan. Arikunto (2004 : 24) menyatakan bahwa penyimpangan-penyimpangan supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah diantaranya: (1) pelaksanaan supervisi di sekolah seringkali masih bersifat umum. Aspek yang menjadi perhatian kurang jelas, sehingga pemberian umpan balik terlalu umum dan kurang mengarah pada aspek yang dibutuhkan guru, (2) guru memiliki persepsi yang kurang tepat terhadap supervisi, berupa inspeksi, kegiatan kontrol yang otoriter, dan hanya mencari kesalahan guru. Sehingga guru tertekan dan tidak bersedia di supervisi. (3) kegiatan supervisi dilakukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu sehingga guru yang disupervisi merasa terjebak; (4) tidak jarang terjadi supervisor tetap menjaga jarak dengan guru-guru yang disupervisi sehingga jalinan kekeluargaan menjadi tidak tampak; (5) prakarsa supervisi datang dari supervisor, menentukan sasaran dan waktu sendiri untuk berkunjung, sangat jarang sekali datang dari guru yang disupervisi; (6) sasaran supervisi masih terlalu umum sehingga hasilnya belum operasional; (7) supervisi dilakukan tanpa memberikan umpan balik, walaupun ada, umpan balik tersebut kurang memadai; (8) kepala sekolah kurang memanfaatkan informasi atau data hasil proses pembelajaran secara maksimal; (9) kemampuan metodologi dan penguasaan materi kepala sekolah dalam melakukan kegiatan supervisi masih terbatas; (10) tidak jarang terjadi guru berusaha menampakkan kinerja terbaiknya hanya saat observasi berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian *Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP)* mengenai kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah, hasil kerjasama pemerintah Indonesia, Australia, Eropa, dan *Asian Development*

Bank, terhadap 4070 kepala sekolah di 55 kabupaten/kota dari tujuh provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, mengungkapkan bahwa kompetensi supervisi adalah kompetensi terendah yang dimiliki kepala sekolah di Indonesia, dibandingkan dengan kompetensi lain. Hasil nilai kompetensi supervisi tersebut sebesar 3.00 dari skala 1.00-4.00. Sedangkan hasil penilaian kompetensi lain sebesar 4.00 untuk setiap kompetensi (Kemdikbud, 12 Juni 2013).

Kondisi di atas merupakan permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan jika seorang kepala sekolah yang mengemban tugas profesional sebagai supervisor dalam pengajaran memiliki kompetensi supervisi yang rendah. Hal ini akan berdampak pada kinerjanya dalam meningkatkan kinerja guru dan mutu pendidikan di sekolah. Kepala sekolah akan kesulitan dalam membina, membimbing dan melakukan upaya perbaikan kualitas pengajaran guru. Di lain pihak, kinerja guru yang baik sangat diperlukan dalam rangka pencapaian mutu pendidikan yang berkualitas.

Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran (Depdiknas, 2008: 21). Menurut Sudjana (2004: 19) kinerja guru sebagai pengajar dapat dilihat dari kemampuan atau kompetensinya melaksanakan tugas tersebut. Kemampuan yang berhubungan dengan tugas guru sebagai pengajar dapat diguguskan ke dalam empat kemampuan, yakni merencanakan proses belajar mengajar, melaksanakan dan mengolah proses belajar mengajar, menilai

kemajuan proses belajar mengajar, menguasai bahan pelajaran. Sejalan dengan Sudjana, P2TK Ditjend Dikti dalam Mulyasa (2008: 20) menguraikan tugas guru sebagai pengajar kedalam tiga kegiatan yang mengandung kemampuan mengajar yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik, dan menilai proses dan hasil pembelajaran. Kinerja guru memiliki kriteria tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 10 (1) dinyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Guru-guru yang sudah lulus sertifikasi dan diakui oleh pemerintah sebagai guru profesional seharusnya menunjukkan kinerja yang sesuai dengan pengakuan tersebut dan sesuai dengan kompetensi inti guru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Deli Serdang pada tahun 2016, guru mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sudah banyak yang bersertifikat pendidik. Dari 64 guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang tercatat sebagai anggota MGMP PPKN Deli Serdang, 56 guru diantaranya telah bersertifikat pendidik dan 8 guru belum bersertifikat pendidik. Konsekuensi guru yang telah lolos sertifikasi antara lain adalah harus melakukan kinerja yang baik. Namun masih banyak guru yang bersertifikat pendidik belum menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya nilai UKG guru khususnya guru PPKN . Rata-rata nilai UKG guru

PPKN adalah 46.5. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan SMA Negeri 1 Lubukpakam. Dari 6 guru PPKN guru yang sudah sertifikasi, rata - rata nilai UKG adalah 47.8. Kondisi ini masih sangat jauh dari kategori baik.

Supervisi akademik yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja guru masih belum optimal dilakukan oleh kepala sekolah. Hasil pengamatan peneliti di SMA Negeri 1 Lubukpakam menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan supervisi akademik kepala sekolah belum terlaksana secara rutin dan berkesinambungan di sekolah tersebut. Pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah sering terabaikan dan lebih fokus pada pembinaan siswa. Padahal tuntutan kinerja dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh guru di sekolah semakin kompleks. Sehingga peran kepala sekolah diharapkan dapat memberikan arahan, bimbingan, dan pembinaan berkelanjutan agar guru dapat memperbaiki kualitas kinerjanya.

Hasil wawancara dan diskusi yang dilakukan kepada 6 (enam) orang guru PPKN di SMA Negeri 1 Lubukpakam, diperoleh fakta bahwa kinerja kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi pembelajaran masih rendah. Pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan kepala sekolah hanya bersifat administratif, yang substansinya belum menyentuh kebutuhan guru secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengajaran. Kepala sekolah melakukan supervisi akademik minimal setahun sekali untuk kepentingan Penilaian Kinerja Guru (PKG). Dari seluruh guru PPKN yang ada di sekolah tersebut, 4 (empat) diantaranya mengatakan bahwa model supervisi individual yang paling sering dilaksanakan di sekolah oleh kepala sekolah. Selain itu, kepala

sekolah sangat jarang melaksanakan program supervisi, baik dalam hal pembinaan dalam penyusunan perangkat pembelajaran, maupun pemantauan pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilakukan guru di dalam kelas. Hal ini dipertegas oleh Mantja yang menyatakan bahwa seharusnya kepala sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina, memantau, memperbaiki proses belajarmengajar yang dilakukan olehguru di sekolah baikpadatahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian (Mantja, 2002:9).

Hal ini didukung temuan Dalimunthe (2008:103-104) bahwa kenyataan hampir 80% kepala sekolah belum merealisasikan fungsi supervisi akademik. Beberapa gejala yang dapat dilihat oleh kepala sekolah antara lain:kepalasekolah tidakdapat menunjukkan buktifisik pelaksanaan supervisi akademik, dan kepala sekolah enggan melakukan supervisi. Banyak kepala sekolah yang belum dapat melakukan supervisi akademik sesuai dengan pelaksanaan supervisi yang benar, yaitu membantu guru mengatasi permasalahan pembelajaran. Kepala sekolah juga tidak terampil melakukan supervisiak ademik, disamping itu guru merasa canggung dan takut untuk disupervisi. Keadaan ini tidak diatasi sehingga kegiatan supervisi akademik tidak dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2004:4) yang mengemukakan bahwa dalam kenyataannya kepala sekolah belum dapat melaksanakan supervisi dengan baik dengan alasan beban kerja kepala sekolah yang terlalu berat serta latarbelakang pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang studi yang disupervisi. Sehingga tujuan untuk membina dan membimbing guru masih belum sempurna serta guru kurang memahami makna dari pentingnya supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Lebih lanjut,

Barokah (2013:3) menyatakan bahwa kepala sekolah maupun kepala sekolah cenderung mengabaikan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Kegiatan supervisi pendidikan dilakukan hanya terhadap penilaian administratif guru saja. Sementara dalam kenyataannya, guru yang memiliki penilaian yang bagus secara administratif belum tentu mampu memiliki *performance* yang baik di dalam kelas. Padahal, jika dilakukan dengan maksimal supervisi dapat meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, karena selain adanya proses penilaian, terdapat juga tindak lanjut berupa bimbingan dan perbaikan secara berkala.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dideskripsikan di atas, maka sangat perlu diadakan penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kinerja Guru Di SMA Negeri 1 Lubukpakam.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMA Negeri 1 Lubukpakam.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah di SMA Negeri 1 Lubukpakam?
2. Bagaimana peningkatan kinerja guru dengan dilaksanakannya supervisi akademik oleh kepala sekolah di SMA Negeri 1 Lubukpakam?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah terhadap guru di SMA Negeri 1 Lubukpakam?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah di SMA Negeri 1 Lubukpakam.
2. Untuk mengetahui peningkatan kinerja guru dengan dilaksanakannya supervisi akademik kepala sekolah di SMA Negeri 1 Lubukpakam.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah terhadap guru di SMA Negeri 1 Lubukpakam.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang peningkatan kinerja guru dalam dengan dilaksanakannya supervisi akademik kepala sekolah.
- b. Bahan acuan bagi penelitian lebih lanjut tentang penerapan supervisi akademik kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru di sekolah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepala Dinas, sebagai bahan pertimbangan dalam rekrutmen dan pembinaan kepala sekolah di wilayah kerjanya.

- b. Pengawas Sekolah

- 1) Sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan kinerja guru di sekolah yang dipimpinnya.

- c. Kepala sekolah

- 1) Sebagai bahan masukan dalam menerapkan supervisi akademik untuk meningkatkan kinerja guru di sekolah.
- 2) Sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kompetensi penelitian dan pengembangan, sehingga dapat mengaktualisasikan diri melalui penulisan penelitian tindakan sekolah.

- d. Guru

- 1) Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pengajaran melalui supervisi akademik.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran agar senantiasa meningkatkan kinerjanya dan mengupayakan perbaikan kualitas pengajaran, agar dapat menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas.

### 1.6 Batasan Istilah

- a. Supervisi Akademik Kepala Sekolah adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut program supervisi untuk membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran serta mengupayakan perbaikan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah.
- b. Kinerja guru adalah suatu hasil atau suatu pencapaian yang diperoleh oleh seorang guru dalam menjalankan tugas dan pencapaian standar keberhasilan yang telah ditentukan oleh sekolah.